



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RDPU PANJA PETA JALAN PENDIDIKAN KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2020 – 2021.
Masa Sidang ke-	: II (Dua).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: 1. Prof. Dr. Arif Satria (Ketua Forum Rektor Indonesia) 2. Dr. Ir. Budi Djatmiko, M.Si (Ketua Umum APTISI) 3. Ki Dr. Saur Panjaitan XIII, MM (Anggota BSNP) 4. Dr. Dino Patty Djalal (Ketua ADI) 5. Prof. Dr. Ir. H. Udiansyah, MS (Kepala L2DIKTI Wilayah XI)
Hari/Tanggal	: Rabu, 25 November 2020.
Pukul	: 14.00 – Selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI (Fisik dan Virtual Menggunakan Zoom).
Pimpinan Rapat	: Agustina Wilujeng Pramestuti, SS, MM (Wakil Ketua Komisi X DPR RI)
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Agenda acara	: 1. Membahas Konsep Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 Kemendikbud dengan mendengarkan masukan dan pandangan dari sisi aspek kebijakan pendidikan tinggi (Kampus Merdeka) dan vokasi 2. Isu lain yang berkaitan pembangunan pendidikan nasional
Hadir Komisi X DPR RI	: 16 orang dari 31 orang anggota Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI.
Hadir Narasumber	: 1. Prof. Dr. Arif Satria (Ketua Forum Rektor Indonesia) 2. Dr. Ir. Budi Djatmiko, M.Si (Ketua Umum APTISI) 3. Ki Dr. Saur Panjaitan XIII, MM (Anggota BSNP) 4. Dr. Dino Patty Djalal (Ketua ADI) 5. Prof. Dr. Ir. H. Udiansyah, MS (Kepala L2DIKTI Wilayah XI) 6. Prof. Dr. Mts. Arief, MBA, CPM (Wakil Ketua Umum ADI)

7. Prof. Dr. Sylviana Murni, SH., M.Si (Wakil Ketua Umum ADI)
8. Muhammed Ali Berawi, M.Eng. Sc., Ph.D (Dosen FTUI)

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR-RI dibuka pada pukul 14.42 WIB oleh Agustina Wilujeng Pramestuti, SS, MM (Wakil Ketua Komisi X DPR RI), setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (2) Peraturan DPR-RI tentang Tata-Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan Prof. Dr. Arif Satria, Dr. Ir. Budi Djatmiko, M.Si, Ki Dr. Saur Panjaitan XIII, MM, Dr. Dino Patty Djalal, dan Prof. Dr. Ir. H. Udiansyah, MS serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI.

II. KEPUTUSAN/KESIMPULAN

A. Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Prof. Dr. Arif Satria, Dr. Ir. Budi Djatmiko, M.Si, Ki Dr. Saur Panjaitan XIII, MM, Dr. Dino Patty Djalal, Prof. Dr. Ir. H. Udiansyah, MS yang telah menyampaikan paparan, masukan, dan saran mengenai Peta Jalan Pendidikan Indonesia (*bahan terlampir*), antara lain:

1. Peta Jalan Pendidikan untuk jenjang pendidikan tinggi harus menetapkan fokus penelitian, inovasi dan *entrepreneurship* pada bidang bisnis (*technopreneurial university*) dan sosial (*sociopreneurial university*).
2. Peta Jalan Pendidikan harus menyatukan pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia industri dan dunia usaha.
3. Peta jalan Pendidikan ditujukan sebagai panduan kebijakan untuk peningkatan kualitas dan kemampuan peserta didik dan pendidik, pemutakhiran sarana prasarana pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru, dan penguasaan teknologi bagi kemajuan bangsa;
4. Peta Jalan Pendidikan harus mengintegrasikan tujuan 4 (empat) sektor pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam strategi jangka panjang Indonesia 2045, yaitu: (i) pengembangan manusia serta penguasaan iptek; (ii) pembangunan ekonomi berkelanjutan; (iii) pemerataan pembangunan; dan (iv) pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.
5. Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta belum dilibatkan dalam penyusunan dan mendapatkan pemahaman tentang arah kebijakan pendidikan yang terdapat dalam Peta Jalan Pendidikan;
6. Peta Jalan Pendidikan belum memberikan gambaran skema pendanaan yang adil bagi PTS sehingga persoalan kesenjangan kualitas PTS dengan PTN bisa diselesaikan;
7. Konsep Peta Jalan Pendidikan yang mengintegrasikan kegiatan Tri Dharma di masing-masing perguruan tinggi perlu dilengkapi strategi untuk menjamin

adanya mekanisme umpan balik (*feedback*) yang terukur agar pelaksanaan Tri Dharma secara nasional sesuai kebutuhan bangsa Indonesia.

8. Peta Jalan Pendidikan belum menguraikan kebijakan dan program prioritas perguruan tinggi berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi, yaitu (i) perguruan tinggi bereputasi dunia sebagai pusat inovasi untuk daya saing bangsa, (ii) perguruan tinggi dengan sasaran 1 PT Unggulan di setiap provinsi dan (iii) universitas terbuka dan *Massive Open Online Courses* (MOOCs) yang ditujukan untuk memperluas akses;
 9. Peta Jalan Pendidikan perlu dilengkapi dengan skema pendanaan perguruan tinggi yang adil dan tidak dikotomis;
 10. Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 dalam proses penyusunannya tidak melibatkan BSNP, dan tidak melalui mekanisme yang transparan dan baku;
 11. Kebijakan Kampus Merdeka yang terdapat dalam Peta Jalan Pendidikan perlu dilengkapi dengan berbagai kebijakan, sistem manajemen mutu, dan berbagai instrumen lain yang mendorong pada tumbuh kembangnya budaya mutu di institusi pendidikan tinggi;
 12. Kebijakan Kampus Merdeka mengalami kendala dalam pelaksanaannya, khususnya bagi pendidikan vokasi karena kurangnya tempat atau industri tempat magang untuk mahasiswa.
- B. Terhadap pandangan, penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber, Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan antara lain:
1. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk menyelaraskan penyusunan Peta Jalan Pendidikan jenjang pendidikan tinggi dengan pembangunan jangka panjang Indonesia 2045 yang disusun oleh Bappenas dan melibatkan para pakar, pemangku kepentingan pendidikan (negeri-swasta);
 2. Mendorong Kemendikbud RI menyusun peta jalan pendidikan secara umum yang menjawab tantangan perubahan dalam industri 4.0, perubahan lingkungan global serta permasalahan terkait disparitas PTS-PTN dan pemenuhan mutu pendidikan tinggi;
 3. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI membuat skema penguatan dukungan dan fasilitas untuk pendidikan swasta (perguruan tinggi swasta) dalam Peta Jalan Pendidikan, sebagai bentuk kebijakan guna mereduksi kesenjangan perguruan tinggi negeri dan swasta;
 4. Mendorong Kemendikbud RI untuk membuat skema pendanaan pendidikan dalam peta jalan pendidikan dengan semangat *money follow students* guna meningkatkan mutu pendidikan tinggi swasta sebagai upaya menjembatani kesenjangan perguruan tinggi negeri dan swasta.
- C. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU ini, dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi Panitia Kerja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI kepada Pemerintah.

I. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 18.18 WIB

KETUA RAPAT,


Agustina Wilujeng Pramestuti, SS, MM